

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENAIKAN IURAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DITINJAU
DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN**

Kartini¹, Dadin Eka Saputra², Fathan Ansori³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM18810297

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN113003830

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1123069301

Email : kartini0297@gmail.com

Kartini, 2022. Analisis Yuridis Terhadap Kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H, M.Hum, Pembimbing II Fathan Ansori, S.H, M.H.

Kata Kunci: **Analisis yuridis, Iuran BPJS, Perpres No. 64 Tahun 2020.**

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan tipe penelitian yang dipakai *statute approach*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau secara hukum terhadap kenaikan iuran Badan Penyekenggara Jaminan Sosial Kesehatan didalam pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang jaminan Kesehatan yang diterbitkan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor &P/HUM/2020 secara legalitas sah, tetapi terkait kebijakan presiden yang kembali menaikkan iuran BPJS dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Analisis yuridis terhadap kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan didalam pasal 34 Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahakamah Agung Nomor 7P/HUM/2020

ABSTRACT

Kartini, 2022. Juridical Analysis of the Increase in Contributions for the Health Social Security Administering Body in terms of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Dadin Eka Saputra, S.H, M.Hum, Supervisor II Fathan Ansori, S.H, M.H.

Keywords: Juridical analysis, BPJS Contribution, Presidential Decree No. 64 Year 2020.

Health development is one of the elements of general welfare that must be realized by the government in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely: Protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia and to promote general welfare, educate people's lives. nation and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice.

The purpose of this study was to determine the juridical analysis of the increase in the contribution of the Health Social Security Administering Body in terms of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This study uses a normative method and the type of research used is the statute approach.

The results of this study indicate that the legal review of the increase in contributions to the Health Social Security Organizing Agency in Article 34 of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance issued after the Supreme Court Decision Number &P/HUM/2020 is legally valid, but related to the policy of the president returning increase BPJS contributions by issuing Presidential Regulation Number 64 of 2020. Juridical analysis of the increase in the Health Social Security Administering Body in Article 34 of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2020 concerning Health Insurance after the Supreme Court Decision Number 7P/HUM/2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek*, Jentera Hukum edisi 8 2005

Ahsi Thohari, *Hak Konstitusional dala Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2016).

Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press, 2017).

Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke- 1

H. Zaeni Asyhdie. *Aspek-Aspek Kesehatan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Podomoro Jakarta Utara 14350.

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*.(Pekanbaru : Suska Press, 2014),

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),
Cet. Ke-3

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2017) Cet. Ke-11

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta:Kanisius, 2017) Cet. Ke-16

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cet. Ke-2

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grapindo Persada, 2006) Cet. Ke.9

Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liebrty, 2008) Cet. Ke-8

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan (Jakarta :BalaiPustaka, 1996)

Internet/Website

Jimly Ashiddiqie Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah dimuat http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Nabila Jusuf, <https://theconversions.com/tiga-cacat-hukum-keputusan-jokowi-naikkan-iuran-BadanPenyelenggara Jaminan Sosial-dan-konsekuensinya-138810>

Ahmad Husen, Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan, Jurnal Lex Scientia law Review, Volume 3 No.1, Mei.